

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Menurunnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian**

Bersumber dari buku “Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi ” yang ditulis oleh Edi Hasibuan selaku ketua Lemkapi (Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia), dalam masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusung program polri presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Program ini merupakan proses pemantapan dari program sebelumnya dengan berbagai program yang diluncurkan untuk menjadikan polri dipercaya oleh masyarakat (Hasibuan, 2023). Fokus utama yang dikedepankan oleh Polri terdapat tiga hal yaitu bertumpu pada kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pemeliharaan Kamtibmas, dan melindungi demokrasi (Hasibuan, 2023). Polri juga berjanji untuk meminimalisir budaya koruptif, menghapuskan arogansi kekuasaan, dan menghilangkan kebiasaan kekerasan (Hasibuan, 2023).

Namun, pada kenyataannya hal yang telah diprogramkan oleh kepolisian tidak sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan. Dapat dikatakan setiap bulannya kepolisian selalu mendapatkan kasus yang paling utama yaitu kekerasan yang dimana dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat. Mengingat bahwa dalam setiap peran kepolisian selalu berhubungan kepada masyarakat dan begitu juga sebaliknya masyarakat butuh kepolisian untuk melindungi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan data dari survey pada tahun 2023 yang membuktikan terkait instansi kepolisian terkait tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum. Kepolisian RI merupakan salah satu lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah yaitu 61 dibanding dengan penegak hukum lainnya seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam riset ini dilakukan secara acak kepada 1.228 responden yang berumur diatas 17 tahun.

## **2.2 Citra Kepolisian Setelah Aksi Peringatan Darurat**

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat dalam Aksi Peringatan Darurat. Aksi Peringatan Darurat merupakan seruan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga demokrasi terkait dengan mengawal keputusan MK tentang jalannya pilkada 2024. Aksi ini menjadi perbincangan hangat dan mengajak masyarakat turun ke jalan untuk mencari keadilan setelah ditetapkannya keputusan MK terkait mengubah syarat politik dan revisi UU Pilkada.

Dalam aksi yang terjadi di beberapa titik kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Khususnya di kota Semarang, terjadi kericuhan antara mahasiswa dan kepolisian yang dimana berimbas pada masyarakat bahkan anak kecil, wartawan, dan lansia juga terkena dampaknya dalam peristiwa tersebut.

Sehari setelah peristiwa tersebut instansi kepolisian mendapatkan tekanan dari masyarakat Indonesia terkait arogansi yang mereka lakukan kepada masyarakat dalam Aksi Peringatan Darurat. Begitu juga di media sosial khususnya aplikasi X terdapat banyak kritikan dari masyarakat terkait video kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat. Tidak hanya itu, tagar #PolisiBrutal juga menjadi menduduki trending tiga setelah beredarnya video kekerasan tersebut.

### **2.3 Kasus Kekerasan Kepolisian di Indonesia**

Bersumber dari data terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam setahun terakhir menurut KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada bulan Juli 2023 - Juni 2024 terdapat 645 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Terdapat 36 kasus pembubaran paksa, 33 kasus peristiwa intimidasi, 52 kasus penganiayaan, 37 kasus penyiksaan, 35 kasus pembunuhan diluar hukum yang menyebabkan 37 korban jiwa. Serta kasus yang baru baru terjadi di kota Semarang terkait penembakan yang dilakukan oleh polisi kepada salah satu pelajar SMK di kota Semarang. Dapat dikatakan setiap bulannya masyarakat selalu mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian RI.

### **2.4 Penggunaan Media Sosial X sebagai Arus Berita**

Saat ini sebagian besar masyarakat mengawali kehidupan mereka menggunakan media sosial, dengan demikian media sosial menjadi fasilitator media online (Rahayu & Hamidah, 2022). Secara garis besar pengguna media

sosial pada tahun 2022 sebanyak 4,59 miliar dan diprediksi akan mengalami peningkatan sebanyak 6 miliar hingga tahun 2027 (Statista, 2023). Usia pengguna dari media sosial sendiri lebih didominasi oleh generasi milenial dan gen Z yang berkisar 18-34 tahun (Kemp, 2023).

Bersumber dari Databoks, menurut laporan dari We Are Social pengguna X mengalami peningkatan sebanyak 22,4% per tahun dan pada bulan Oktober 2023 jumlah pengguna X di Indonesia berkisar 27,5 juta serta menduduki peringkat keempat secara global di bawah Amerika Serikat, Jepang, India. Bersumber dari GoodStats, media sosial X menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam hal mendapatkan berita baru berbaur nasional atau politik, ulasan atau komentar, dan pandangan lain. Dalam media sosial X pengguna dapat melakukan tweet (membuat status) dan me-retweet (memposting ulang tweet seorang). Bruns & Highfield (2012) menjelaskan media sosial X menjadi ruang untuk berbagi dengan konten yang tidak terbatas, termasuk politik. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Reuters Institute, bahwa media sosial X menjadi salah satu yang terbanyak digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan berita terbaru yaitu sebanyak 25%. Hal ini merupakan angka paling tinggi dibanding dengan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Tiktok yang berada di angka 11% hingga 16%. Pengguna media sosial sebanyak 20% menggunakan X untuk melihat ulasan atau opini dari permasalahan yang ada atau ingin diketahui. Para peneliti sebelumnya telah menemukan bahwa media sosial X merupakan sebuah tempat

untuk melakukan perdebatan politik dengan pengguna yang cukup aktif dalam hal politik.